

DISELIMUTI KABUT ASAP TEBAL LAGI

Pemkot Jambi Rumahkan Pelajar PAUD hingga SMP

JAMBI (IM)- Pemerintah Kota Jambi kembali mengambil keputusan untuk merumahkan pelajar dan menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara online atau daring bagi pelajar sekolah tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP sederajat, negeri/swasta, mulai hari Rabu 18 Oktober hingga Jumat 20 Oktober 2023.

Pasalnya, kondisi kualitas udara lantaran kabut asap dari kebakaran lahan kembali menyelimuti Kota Jambi. Akibatnya, sangat tidak sehat, sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama anak didik. “Namun kebijakan ini akan terus ditinjau menyesuaikan situasi kondisi, karena sewaktu-waktu secara situasional bisa berubah,” ujar Juru Bicara Pemkot Jambi, Abu Bakar, kemarin.

Menurutnya, kebijakan tersebut tertuang dalam Edaran Wali Kota Jambi nomor 21/EDR/HK/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Masa Kabut Asap di Kota Jambi.

Katanya, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi aktual hasil pengukuran kualitas udara dalam kurun waktu 48 jam terakhir oleh Gugus Tugas (Task Force) Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Dampak Kabut Asap Kota Jambi. “Berdasarkan laporan hasil

analisa dan pemantauan yang dilakukan oleh satgas dalam kurun waktu 48 jam terakhir, kondisi kualitas udara kembali sangat tidak sehat, sangat membahayakan kesehatan manusia, terutama anak didik. Kita perkirakan kondisi ini akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu kami memutuskan kembali merumahkan pelajar,” jelasnya.

Selama 48 jam tersebut, jelas Abu, terjadi trend kenaikan yang signifikan pada parameter PM 10 dan PM 2,5 yang menjadi parameter knis acuan standar kualitas udara di Kota Jambi.

Dia menambahkan, bahwa kondisi sebaran asap masuk ke Kota Jambi tersebut sifatnya situasional, karena tergantung dari kondisi banyaknya hotspot di daerah sumber asap dan arah hembusan angin. Sehingga kecenderungan yang terjadi adalah fluktuasi kepekatan kabut asap yang terjadi dalam satu hari.

“Kita semua berharap kondisi ini jangan sampai berlangsung lama, karena akan banyak menimbulkan kerugian bagi anak didik maupun masyarakat secara umumnya. Namun sekali lagi, prioritas utama adalah keselamatan masyarakat,” imbuh Abu.

“Kami berharap masyarakat terus disiplin menjaga kesehatan pribadi dan keluarga, taat protokol kesehatan, disiplin memakai masker dan jangan biarkan anak-anak bermain diluar selama PJJ,” harap Abu. ● **pra**

Menyedihkan, Puluhan Anak di Cilegon jadi Korban Eksploitasi

CILEGON (IM)- Naisib menyedihkan dialami puluhan anak di Kota Cilegon. Mereka menjadi korban eksploitasi oleh orang tua maupun keluarganya sendiri.

Kondisi tersebut terungkap pada peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon, Rabu (18/10).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon, Agus Zulkarnain menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki oleh pihaknya, sejumlah anak dilaporkan jadi korban eksploitasi.

Menurut Agus, kondisi itu tidak bisa ditampik karena selain adanya data laporan, juga terlihat di permukaan jika masih banyak anak yang dieksploitasi.

Agus mencontohkan, masih ada anak-anak yang mengamen atau berada di jalanan sebagai salah satu gambaran eksploitasi itu terjadi.

“Iya, kita tahu masih

ada anak yang dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,” ujar Agus.

Dikatakan Agus, bentuk eksploitasi pada anak biasanya terjadi dalam bentuk anak didorong untuk bekerja.

Anak yang seharusnya bermain dan belajar, justru didorong untuk bekerja seperti mengamen, memungut barang bekas, atau dalam bentuk lainnya.

Menurutnya, untuk menyikapi persoalan tersebut, perlu peran serta bersama semua stakeholder.

Peran masyarakat pun sangat diperlukan agar anak-anak di Kota Cilegon bisa terhindar dari tindakan eksploitasi. “Kita pun kerap rapot lintas sektor untuk menyikapi persoalan ini,” ujar Agus.

Menurut Agus, secara keseluruhan ada sekitar 40 anak di Kota Cilegon menjadi korban eksploitasi maupun kekerasan.

Upaya-upaya pencegahan dan sosialisasi terus dilakukan DP3AP2KB Kota Cilegon untuk menekan persoalan tersebut. ● **pra**



PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA DI BOGOR

Bupati Bogor Iwan Setiawan mengunjungi pameran stan olahan makanan lokal saat acara Hari Pangan Sedunia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). Kegiatan itu mengangkat tema Hidup Sehat dan Bahagia dengan Konsumsi Olahan Lokal.

DPRD Belum Berniat Dorong Pemkab Tangerang Beli Saham Bank Banten

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri mengatakan, pihaknya belum terpikir untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki saham Bank Banten. Karena, setahu dia, Pemkab Tangerang juga masih memiliki uang yang nilainya Rp 50 miliar di Bank Banten.

TANGERANG (IM)- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tangerang menjawab rencana Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, untuk menawarkan saham Bank Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Banten.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri mengatakan, pihaknya

belum terpikirkan untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa memiliki saham Bank Banten. Karena, setahu dirinya, Pemkab Tangerang juga masih memiliki uang yang nilainya Rp 50 miliar di Bank Banten.

“Saat ini kami belum melakukan apa-apa terkait penawaran dari Pj Gubernur

Banten,” ungkapnya, Rabu (18/10).

Kalau nanti secara resmi terkait tawaran tersebut, kata Sapri, DPRD Kabupaten Tangerang akan menggelar rapat koordinasi oleh Pemkab Tangerang untuk melakukan langkah. “Kaitan ini pastinya akan berjalan lama, karena memang ini terkait anggaran,” ujar anggota Fraksi PKS ini.

Kemudian, kata Sapri, apakah dengan memiliki saham Bank Banten bisa menjadi langkah strategis Pemkab Tangerang? Tentu itu akan dikembalikan kepada semua pihak, yakni DPRD Kabupaten Tangerang, Pemkab Tangerang, serta masukan dari masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Sebab, uang yang Rp 50 miliar yang ada di Bank Banten saja mau ditarik oleh Pemkab

Tangerang, namun hingga saat ini belum bisa,” pungkasnya.

Bagi-bagi Saham

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menawarkan saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Al Muktabar, penawaran itu agar Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai rasa memiliki Bank Banten. “Kita ingin (Pemerintah Kabupaten/Kota) bagian dari memiliki Bank Banten. Oleh karenanya kita sedang mempersiapkan untuk distribusi saham yang dimiliki kita kepada Kabupaten/Kota,” ujar Al.

Kata dia, Pemprov Banten cukup dominasi kepemilikan saham sebesar 51 persen.

“Saham kita 66,11 persen

kurang lebih dan selisihnya akan didistribusikan ke Kabupaten/Kota, maka Kabupaten/Kota akan menjadi pemilik Bank Banten,” terangnya.

La berharap, dengan memiliki Bank Banten, maka Pemerintah Kabupaten/Kota tentu menjadi bagian kepemilikan bersama Bank Banten.

Rencana pembagian saham itu akan dilakukan Pemprov setelah Perda tentang Pembentukan Bank Banten sebagai BUMD Pemprov Banten rampung.

“Sekarang susun Perda. Setelah itu, karena Kabupaten/Kota juga harus ada Perda menerima itu. Kita mempersiapkan agar berkenan Kabupaten/Kota menerimanya. Diharapkan, rasa memiliki juga ada,” tuturnya sebagai Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank Banten. ● **pra**

Pemkab Tangerang Diminta Segera Atasi Pencemaran Limbah Pabrik

TANGERANG (IM)- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umar Dani meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat agar segera turun tangan mengatasi persoalan pencemaran limbah dan pencemaran udara yang berasal dari pabrik peleburan besi milik PT Power Steel Indonesia di Kawasan Industri Millenium.

“Dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Tangerang harus segera merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait dugaan polusi yang di akibatkan aktivitas salah satu perusahaan yang berada di Kawasan Millenium itu,” kata Deden di Tangerang, kemarin.

Ia mengungkapkan, dalam persoalan ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang harus segera merespon apa yang menjadi aduan masyarakat terkait kasus dugaan pencemaran limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) atas kegiatan pabrik peleburan besi tersebut.

“Peran dan tanggung jawab menjaga keselamatan warga masyarakat Tangerang harus diutamakan, jangan dikalahkan dengan bahasa menjaga iklim investasi. Lantas kita mengorbankan keselamatan masyarakat dan lingkungan,” ungkapnya.

Dia pun menyarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk langsung turun tangan mengatasi persoalan pencemaran limbah pabrik dan pencemaran udara dari PT Power Steel Indonesia yang sudah terjadi selama beberapa tahun tersebut.

“Dicek kebenarannya, jika ditemukan dan benar adanya pelanggaran maka dinas harus dengan tegas

menindak perusahaan,” kata dia.

Sebelumnya, masyarakat Kampung Cibarengkok, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, mengeluhkan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang diduga berasal dari pabrik peleburan besi milik PT Power Steel Indonesia di Kawasan Industri Millenium.

“Kalau pagi atau pun malam, asap dari pabrik peleburan besi ini sampai ke rumah. Bahkan terkadang saking sering dan meluasnya polusi itu sampai kita batuk-batuk,” ucap salah satu warga Desa Peusar yang enggan disebutkan Namanya.

Menurut dia, polusi limbah B3 dari pabrik peleburan besi tersebut sangat tidak ramah lingkungan, sehingga hal itu menyebabkan kondisi udara di kawasan permukiman warga berubah menjadi tidak sehat.

Selain itu, polusi yang dihasilkan mengganggu kesehatan warga dan lingkungan sekitar karena diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).

Warga lainnya, Sutiya (48), menuturkan pencemaran udara sudah terjadi sejak beberapa tahunan yang lalu. Bahkan, pada sekitar tiga tahun yang lalu warga sempat menuntut pertemuan atau mediasi soal kasus pencemaran pabrik peleburan besi tersebut.

“Dulu sempat ada pertemuan. Dan pihak perusahaan memberikan kompensasi kepada warga, cuma sekali. Sekarang sudah tidak ada lagi, bahkan pabrik itu tidak melakukan perbaikan pengelolaan limbahnya,” ujar dia. ● **pp**

Sekretaris DPRD Jawa Barat Terima Lawatan dari DUN Sabah Malaysia



BANDUNG (IM)- Sekretariat DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah, Malaysia. Kunjungan kerja tersebut terkait sharing informasi tugas dan fungsi DPRD hingga terkait sistem pemerintahan masing-masing wilayah (Sabah, Malaysia dan Jabar, Indonesia).

Kunjungan kerja DUN Sabah, Malaysia diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Jawa Barat, Barnas Adjadin. Turut mendampingi Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-Undangan, Iis Rostiasih beserta para pejabat struktural Sekretariat DPRD Jawa Barat di ruang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar, Bandung, Senin (16/10).

Dalam kesempatan itu, Barnas Adjadin menyambut positif sekaligus berterima kasih atas kunjungan kerja yang dilakukan DUN Sabah, Malaysia. Pihaknya pun berharap Sekretariat DPRD Jawa Barat bisa membalas lawatan tersebut dengan kunjungan kerja ke DUN Sabah, Malaysia.

Terima kasih atas kunjungan kerjanya. Mudah-mudahan kedepan kita (Sekretariat DPRD Jawa Barat atau DPRD Jawa Barat) bisa membalas kunjungan kerja ini ke DUN Sabah, Malaysia, katanya.

Sebelumnya, saya tadi sudah lapor ke Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, (Bey Machmudin), dan Pak Pj Gubernur Jabar menitipkan salam hangat dari Pak Pj Gubernur Jabar,” kata Barnas Adjadin.

Selama pertemuan, Barnas Adjadin menyampaikan tugas dan fungsi DPRD Jawa Barat secara terperinci, termasuk menjelaskan agenda atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh 120 ang-

gota DPRD Jawa Barat. Dibahas pula soal sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk Jabar, dan terkait program-program di Jabar hingga kekayaan yang dimiliki Provinsi Jabar.

“Jabar menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak penduduknya. Sehingga jumlah anggota DPRD-nya juga banyak. Berbeda dengan Sabah, Malaysia yang penduduknya tak sebanyak di Jabar,” ucapnya.

Meskipun menjadi provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak, Jabar merupakan salah satu provinsi yang kaya akan SDA, mulai dari laut, pegunungan hingga kekayaan kebudayaannya, seperti batik yang memiliki ciri khas disetiap wilayah di Jabar.

Perguruan Tinggi (PT) di Jabar pun cukup komplit, tak sedikit masyarakat Malaysia yang belajar (kuliah) di Jabar.

Dari aspek pembangunan infrastruktur, saat ini kereta api cepat sudah tersedia di Jabar. Provinsi Jabar pun belum lama ini telah meresmikan Bandara Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, jalan tol terbentang di banyak wilayah.

Di tempat yang sama Ketua

DUN Sabah, negara bagian Malaysia, Datuk Seri Panglima HJ Kazim HJ M. Yahya, JP mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Sekretariat DPRD Jawa Barat, dan penjelasan terperinci tugas dan fungsi DPRD serta berbagai informasi penting lainnya terkait Provinsi Jabar.

Diakuinya, terdapat beberapa perbedaan antara Jabar, Indonesia dengan DUN Sabah, Malaysia. Seperti sistem pemerintahan yang sangat kentara. Malaysia menerapkan sistem pemerintahan parlementer atau Parlimen Westminster Inggris, sedangkan Indonesia menerapkan sistem presidensial.

Meskipun begitu, terdapat banyak persamaan antara Provinsi Jabar, Indonesia dengan Sabah, Malaysia, salah satunya, yang memimpin wilayah adalah gubernur bukan raja dan masih banyak lagi kesamaannya.

“Banyak yang kami pelajari dari lawatan singkat ini, tetapi dengan penjelasan yang amat padat dari Sekretariat DPRD Jawa Barat. Kami mendapatkan banyak informasi, pengetahuan yang sangat bermanfaat,” katanya. ● **lys**



DPRD Dorong Pemkot Tangerang Terapkan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan



Gatot Wibowo, Ketua DPRD Kota Tangerang.

TANGERANG (IM)- DPRD Kota Tangerang mendorong Pemkot Tangerang untuk menerapkan Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini dilakukan dalam rangka mencegah kasus perundungan atau bullying terhadap anak-anak yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, DPRD bersama Pemkot Tangerang sudah mengesahkan Perda tersebut. Karenanya penting sekali ditanamkan tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada anak-anak sekolah.

“Ini yang harus dikembalikan sampai dengan tataran anak-anak sekolah sejak usia dini. Ditanamkan nilai-nilai Pancasila tentang keberagaman kebhinekaan yang ada di Indonesia” kata Gatot, baru baru ini.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, di beberapa daerah telah menerapkan setiap pukul 10.00 WIB anak-anak sekolah sudah dibiasakan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi sigap. “Kalaupun tidak setiap hari, minimal sekurang-kurangnya karena Proklamasi

Kemerdekaan itu dibacakan hari Jumat ya setiap hari Jumat pukul 10.00 WIB,” tuturnya.

Gatot berharap kasus-kasus perundungan anak atau bullying tidak terulang khususnya di Kota Tangerang. Gatot meminta untuk menanamkan ke anak-anak usia dini mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, bullying itu tidak keren, bullying penakut pengecut.

“Tanamkan dan perkuat nilai-nilai keagamaan sesuai keyakinan pemeluknya masing-masing di sekolah, termasuk juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Menurut Gatot, kasus-kasus bullying terjadi pada korban dan pelaku yang sama-sama masih berstatus pelajar, maka dari itu menekankan nilai-nilai keyakinan beragama, bukan hanya di keluarga tapi juga di sekolah-sekolah.

“Ini semua menjadi tanggung jawab bersama, baik orang tua, sekolah, dan pemerintah. Karena kita sudah mengesahkan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dimasukkannya nilai-nilai luhur Pancasila di sekolah,” tuturnya. ● **juh**